

## ARAH DEMOKRASI IDEAL INDONESIA BERBASIS KERAGAMAN ETNIS

Lesti Heriyanti dan Siti Baroroh  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

### Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman etnis terbesar di dunia memiliki beragam persoalan dalam mengedepankan proses demokrasi ditengah kondisi yang sangat heterogen. Perkembangan demokrasi seringkali mengalami guncangan pada saat dihadapkan pada persoalan sentiment etnisitas yang masih sering etradi sebagai suatu dinamika dalam politik di Indonesia. Kajian tulisan ini bertujuan untuk menganalisis arah demokrasi ideal di Indonesia dalam pandangan pemikiran berbagai ahli. Metode penulisan dilakukan dengan studi pustaka bersumber dari jurnal dan buku literature. Hasil kajian mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia yang heterogen merupakan potensi yang besar sebagai modal pembangunan demokrasi Indonesia, namun juga menyimpan potensi konflik karena keragaman etnis yang dimiliki.

Kata kunci : demokrasi, etnis, Indonesia

### Pendahuluan

Sistem demokrasi merupakan konsep ideal yang mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan semua pihak lainnya. Perwujudannya mampu menciptakan keadilan sosial yang adil dan merata bagi semua pihak jika dijalankan dengan baik. Perwujudan demokrasi yang baik akan mendukung terciptanya kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang berjalan selaras dengan pengakuan akan

kebebasan individu untuk mengeluarkan pendapat dan beraktivitas sosial dalam nilai dan norma yang berlaku. Harmonisasi sosial akan tercipta melalui kondisi ini.

Demokrasi mengalami persoalan ketika harmonisasi yang diinginkan tidak terwujud karena perbedaan yang ada di dalam masyarakat, terutama sekali jika masyarakat tersebut merupakan masyarakat majemuk seperti Indonesia. Kemajemukan

masyarakat dari aspek etnisitas, agama, ras, dan kondisi sosial ekonomi merupakan suatu tantangan untuk mewujudkan demokrasi.

Demokrasi dengan dilatarbekangi keragaman mampu menciptakan kondisi perpecahan dalam masyarakat. Tiap-tiap individu ingin menyampaikan aspirasinya dan memiliki keinginan agar aspirasinya bisa didengar dan dilaksanakan, namun terkadang hal tersebut bisa bertentangan dengan keinginan atau pendapat pihak lain. Kondisi ini merupakan hal yang senantiasa akan terjadi dalam masyarakat majemuk, dimana terkadang demokrasi mampu menampung aspirasi semua pihak namun belum tentu dapat mewujudkan aspirasi tersebut dalam tindakan nyata di kehidupan sosial.

Berkaitan dengan persoalan demokrasi, maka Indonesia menghadapi tantangan yang sulit karena kondisi masyarakatnya yang beragam. Perwujudan demokrasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini mampu berjalan

dengan baik, namun akan berbeda kondisinya ketika dihadapkan pada persoalan besar yang menyangkut kehidupan bangsa. Benturan kepentingan antar berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda, terutama sekali jika mereka memiliki posisi sebagai pihak pemegang kekuasaan akan sangat menentukan jalannya demokrasi di Indonesia. Konsep demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” hanya akan menjadi retorika semata. Rakyat tidak merasakan manfaat dari jalannya demokrasi dalam mengatur kehidupan mereka. Kondisi yang ada malah membuat mereka tereksplotasi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atas nama demokrasi. Hal ini akan semakin sering terjadi ketika proses demokrasi dilaksanakan dalam wujud pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Rakyat akan terekspos sebagai sumber penghasil suara yang bisa dimanfaatkan untuk mendulang kemenangan dalam pemilihan yang terjadi. Kepentingan rakyat dijanjikan akan dipenuhi ketika

individu tertentu yang ingin dipilih tersebut mengalami kemenangan. Rakyat yang terbuai janji akan memilihnya dan ketika ini terjadi semua tumpuan perwujudan kehidupan yang lebih baik dititipkan rakyat pada individu yang dipilihnya tersebut. Hanya saja sayangnya, hal tersebut jarang terjadi. Individu yang dulunya mengatasnamakan kepentingan rakyat akan melupakan rakyat ketika dia telah mendapatkan kekuasaan. Sehingga dapat diuraikan bahwa perwujudan demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanya menjadi retorika semata.

Melalui tulisan ini akan diuraikan perbandingan konsep demokrasi dan arah ideal demokrasi Indonesia berbasiskan kondisi etnisitas negara ini yang mampu menjadi potensi konflik atau pemersatu bangsa menuju kondisi yang lebih baik lagi.

### **Review dan Analisis**

Sejarah demokrasi Indonesia dalam kajian Furnivall (2009) tidak bisa terlepas dari

perkembangan perekonomian Indonesia sejak masa penjajahan hingga pemberlakuan sistem perekonomian yang mampu mempengaruhi sistem ekonomi, politik dan sosial Indonesia hingga saat ini. Furnivall (2009) menguraikan bahwa keragaman etnis, wilayah tenurial dan kondisi sosial Indonesia yang terkotak-kotak pada masa penjajahan Belanda membuat Indonesia memiliki suatu bentuk perekonomian majemuk. Perekonomian majemuk mendorong perekonomian Indonesia dalam suatu kondisi pasar dengan beragam peran yang dimainkan oleh beragam individu (Furnivall 2009).

Hal ini tidak akan menjadi sesuatu yang buruk jika tiap individu mampu melakukan peranannya dalam sistem pasar dengan baik, namun kondisi yang terjadi sangat beda dengan yang diharapkan. Perekonomian majemuk membuat terjadinya segmentasi dalam perekonomian,. Etnis tertentu dengan kemampuan perekonomian yang besar dan memiliki modal yang besar akan

mampu menguasai pasar dan mengubah sistem peranan yang ada di pasar. Keleluasaan yang dimilikinya karena ketersediaan akses pada aset ekonomi cenderung mengakibatkan terjadinya diskriminasi bagi etnis tertentu yang tidak mampu memiliki aset dengan sama besarnya. Kondisi ini akan makin parah ketika pihak penguasa juga bertindak sebagai pengusaha, dimana dengan kekuasaan yang dimilikinya maka ia akan lebih mampu menguasai pasar dan sistem perekonomian dan merugikan pihak rakyat yang berada dalam kekuasaannya baik secara ekonomi maupun politik. Sehingga dapat diuraikan bahwa tidak terdapat demokrasi dalam bidang ekonomi pada kondisi seperti ini.

Kajian Furnivall (2009) ini pada intinya menguraikan persoalan demokrasi dalam bidang ekonomi di Indonesia yang tidak mampu terwujud karena adanya ekonomi majemuk. Perekonomian majemuk bertentangan dengan semangat demokrasi terutama sekali jika

persoalan ekonomi tidak dikaitkan dengan persoalan sosial dan politik, sebab sebagaimana diketahui dari tulisan Furnivall (2009) bahwa persoalan ekonomi Indonesia berdasarkan sejarah kolonialisme yang ada dan hal ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik Indonesia.

Kajian Furnivall (2009) terkait dengan ulasan Wiradi (2015) yang membahas mengenai persoalan demokrasi dalam bidang perekonomian. Wiradi (2005) mengungkapkan mengenai konsep demokrasi tidak bisa terlepas dari persoalan politik karena sangat terkait dengan persoalan-persoalan penyelenggaraan negara dalam aspek tataran filosofis, empiris dan ideologis yang dianut suatu negara. Tulisan Wiradi (2005) mengungkapkan bahwa sejarah demokrasi dunia tidak bisa lepas dari sejarah Yunani tempat berasalnya sistem ini yang merupakan hasil pemikiran para filsuf. Tipe negara demokrasi dinilai oleh para filsuf merupakan suatu konsep bentuk negara yang ideal di tengah kondisi

masyarakat yang homogen. Demokrasi juga bisa terwujud jika terjadi harmonisasi antar warga negara dengan jumlah warga negara yang sedikit dan mereka memiliki keaktifan dalam berpartisipasi terhadap pembuatan dan penerapan aturan perundang-undangan yang dibuat negara. Rakyat terlibat aktif sebagai pengawas pemberlakuan undang-undang tersebut dalam kehidupan mereka.

Keterlibatan rakyat dalam membuat, menerapkan dan mengawasi serta mengawal penerapan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diutarakan merupakan wujud nyata dari konsep demokrasi yang diterapkan pada masa-masa awal sistem demokrasi di Yunani. Konsep inilah yang hingga sekarang berkembang ke berbagai wilayah negara yang ada di dunia dengan beragam variasi dan mengalami penyesuaian dengan kondisi masyarakatnya yang heterogen.

Wiradi (2015) menjelaskan juga bahwa Indonesia pernah mengalami

beragam bentuk demokrasi sejak kemerdekaan hingga sekarang. Indonesia dulu pernah menganut demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Sukarno. Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang berlangsung setelah masa revolusi fisik pasca kemerdekaan Indonesia. Bentuk demokrasi sangat mengakui kebebasan individu untuk berserikat dan pengakuan HAM. Pada masa demokrasi ini, semangat berpolitik, berserikat dan membentuk partai sebagai suatu bentuk wadah aspirasi rakyat meningkat tajam, dalam artian pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk terbentuknya partai politik dan hasilnya pada pemilu pertamakalinya di Indonesia diikuti oleh 44 partai politik.

Setelah era Soeharto, bentuk demokrasi yang berkembang di Indonesia juga mengalami perubahan.. Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin yang dapat digambarkan sebagai demokrasi semu. Ini karena pemerintah sangat mengontrol

kebebasan rakyatnya untuk berserikat dan berpolitik. Hal ini ditandai oleh semakin berkurangnya jumlah partai peserta pemilu tiap periode pemilihan umum terjadi. Hingga akhirnya jumlah peserta pemilu hanya 3 partai, dimana satu partai merupakan partai yang mewakili kepentingan pemerintah yaitu Partai Golongan Karya (Golkar). Pengurangan jumlah partai politik peserta pemilu juga menandai terjadinya perubahan implikasi dalam memandang keragaman masyarakat Indonesia. Pada masa demokrasi liberal, dengan jumlah partai yang banyak mampu menampung aspirasi masyarakat dalam partai-partai yang berbeda, namun dalam masa demokrasi terpimpin terjadi perubahan yang sangat nyata dalam upaya penyeragaman visi politik rakyat Indonesia hanya kedalam tiga partai semata. Kondisi ini pada satu sisi dianggap mampu meredam potensi konflik yang dapat muncul dari pihak-pihak dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda dalam satu kesatuan, namun pada sisi

lain merupakan suatu bentuk pengekangan terhadap kebebasan berpolitik individu dan ketiadaan upaya untuk menjembatani perbedaan politik masyarakat dalam wadah yang tepat.

Sehingga dapat diutarakan bahwa sistem demokrasi pada masa Soeharto merupakan suatu sistem demokrasi yang semu, yang mengecilkan kebebasan individu untuk berekspresi dan menuangkan kebebasan politiknya serta tidak mampu menjamin terselenggaranya kehidupan politik yang sehat. Ini pada akhirnya juga mendorong terjadi segmentasi keistimewaan perlakuan yang didapatkan oleh tiap partai. Partai penguasa mendapatkan keistimewaan yang berlebih terkait penguasaan aspek perekonomian negara. Ini bisa dilihat dari tokoh Partai Golkar yang sebagian besar merupakan pengusaha besar di Indonesia, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan dan PDI hanya memiliki sedikit kader yang bergerak dalam bidang perekonomian. Jika disimpulkan maka dapat diungkapkan bahwa

demokrasi di Indonesia pada masa pra reformasi atau pasca Soekarno tidak mencerminkan cita-cita perjuangan *founding fathers* Indonesia pada awal kemerdekaan dulu.

Ulasan mengenai kondisi kehidupan masyarakat Indonesia dari segi ekonomi politik juga dikaji oleh Swasono (2010). Ia mengungkapkan mengenai penyimpangan peran negara dalam memberikan derajat kehidupan yang baik. Negara tidak mampu menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan rakyatnya dengan penerapan sistem ekonomi yang selama ini berjalan. Manfaat demokrasi yang semestinya mampu dirasakan seluruh rakyat ternyata hanya bisa dinikmati oleh segelintir pihak saja. Swasono (2010) menuturkan terjadi penyimpangan dalam aspek penyelenggaraan negara, negara dinilai tidak mampu menyelenggarakan suatu bentuk pemerintahan yang menjamin kesejahteraan perekonomian rakyatnya. Negara tidak mampu menjamin terlaksananya

demokrasi ekonomi bagi rakyatnya yang dijamin Undang-Undang Dasar RI. Keleluasaan untuk berusaha di bidang perekonomian hanya dimiliki segelintir rakyat saja dan ini menimbulkan persoalan perekonomian bagi rakyat lainnya.

Persoalan demokrasi dalam bidang politik dan ekonomi juga menjadi kajian dalam buku yang menjadikan Hefner (2011) sebagai editornya. Buku yang berjudul Politik Multikulturalisme menguraikan mengenai implikasi keberagaman etnis yang berpengaruh pada keanekaragaman pola-pola budaya atau multikulturalisme. Aspek multikulturalisme akan membuat tersegmentasinya masyarakat dalam kelompok-kelompok berdasarkan etnis, agama, golongan, jenis pekerjaan dan gender serta ini pada akhirnya akan mempengaruhi sistem politik yang berjalan di wilayah tertentu. Buku ini menceritakan dinamika sosial, ekonomi dan perpolitikan yang terjadi di beberapa wilayah di

Indonesia, Malaysia dan Singapura. Ketiga negara ini dinilai memiliki persoalan yang berbeda-beda terkait dengan etnisitas atau identitas etnis yang ada dan mewarnai kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Konsep pluralisme dan perbedaan gender kerap menjadi suatu persoalan yang terjadi dalam masyarakat heterogen yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap gejolak dan dinamika sosial yang terjadi. Beragam tulisan yang terdapat dalam buku ini menceritakan mengenai transisi yang dialami oleh negara-negara Asia yang merupakan bekas negara jajahan seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Penjajahan yang terjadi mampu membuat masyarakat pribumi terkotak-kotak dalam lapisan sosial tertentu dengan perlakuan diskriminasi atau perbedaan dengan kaum pendatang yaitu bangsa penjajah Belanda, Jepang, dan Inggris serta bangsa China yang datang ke negara-negara tersebut sebagai pedagang. Kedatangan China membuat pola pengelompokkan

di negara tersebut semakin nyata, dengan penempatan bangsa China sebagai kelas menengah dan kaum pribumi kelas bawah maka identitas etnis yang dimiliki mereka semakin menguat. Pasca penjajahan, setelah bangsa-bangsa tersebut merdeka pola segmentasi mengalami perubahan. Negara seperti Singapura dikuasai bangsa China, di Malaysia dan Indonesia terdapat pembatasan ruang gerak etnis China di bidang politik, namun pembatasan mereka dalam ruang politik tersebut malah membuat terbukanya peluang mereka seluas-luasnya di bidang ekonomi. Perekonomian di Malaysia dan China tidak bisa dipungkiri dikuasai oleh China.

Kebebasan yang dimiliki oleh bangsa China di Singapura dan hambatan ruang gerak mereka di Indonesia dan Malaysia menandai bahwa terjadi suatu perbedaan proses transformasi dalam demokrasi di ketiga negara tersebut. Proses demokrasi di Singapura berjalan dengan memberikan ruang dan peluang yang sama bagi etnis yang ada sehingga dengan proses kompetisi

terjadilah kondisi majunya perekonomian etnis China dibandingkan etnis pribumi dan etnis lainnya yang ada di Singapura. Sedangkan di Indonesia dan Malaysia terjadi transformasi dalam demokrasi namun dilandasi dengan menguatnya semangat etnis pribumi. Kesempatan diberikan kepada etnis China namun tidak di semua bidang. Hal yang sama juga terjadi dalam aspek gender. Kesetaraan gender terjadi dan diakui namun kaum perempuan tidak sepenuhnya mampu mendapatkan perlakuan yang setara dengan laki-laki, terdapat unsur budaya dan agama yang membatasi ruang gerak perempuan mencapai kesetaraan. Di sisi lain gender pun dibingkai dalam kerangka pluralisme dan menjadi kondisi yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Pengakuan kesetaraan gender dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang plural mampu membuka kesempatan bagi perempuan atau pihak tertentu untuk bergerak dalam bidang politis yang dinamis pasca

reformasi (Dzuhayatin *dalam* Hefner 2015)

Pandangan terkait dengan pluralisme Indonesia dan pengaruhnya bagi etnisitas dan demokrasi juga dapat diurai melalui tulisan Tridakusumah (2015), ia memandang bahwa identitas sosial, fenomena etnisitas dan mobilitas internal di Indonesia merupakan suatu proses yang berkembang seiring terjadinya perkembangan kehidupan perekonomian di Indonesia yang mengalami ketimpangan antar wilayah. Kebijakan pemerintah yang menerapkan otonomi daerah menjadi salah satu pemicu berlangsungnya proses migrasi atau transmigrasi penduduk di Pulau Jawa ke Pulau lainnya di Indonesia. Otonomi daerah menjadi penyebab berlangsungnya mobilitas internal di Indonesia. Otonomi daerah membuka kesempatan masyarakat untuk bekerja dan mencari kehidupan yang lebih baik di daerah lainnya. Migrasi internal di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh etnis Jawa yang berasal dari

Jawa Tengah dan dari Jawa Timur. Keputusan untuk migrasi mengubah kondisi kehidupan sosial mereka yang dulu bersifat homogen menjadi lebih heterogen dengan percampuran etnisitas, sosial dan budaya di tempat tujuan mereka migrasi.

Sayangnya perwujudan pemerataan bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak mampu dirasakan setiap orang. Pemerintah mengedepankan proses kemajuan dan modernisasi di Pulau Jawa sehingga wilayah di luar Jawa mengalami ketimpangan ekonomi dan pembangunan serta masyarakatnya mengalami kemiskinan, walaupun daerahnya memiliki sumber daya alam yang banyak. Kondisi Pulau Jawa yang lebih maju dibandingkan Pulau lain di Indonesia juga tidak menjamin kesejahteraan semua penduduknya meningkat, sehingga kondisi ini membangkitkan semangat penduduk di Indonesia yang umumnya berada di Pulau Jawa untuk melakukan migrasi ke

Pulau lain yang dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi.

Berkaitan dengan demokrasi di Indonesia, Sjaf (2014) menuturkan bahwa etnisitas mampu berperan dalam membuka sekat-sekat yang muncul sebagai akibat ketidaksamaan perolehan keistimewaan tertentu dalam bidang-bidang ekonomi, sosial dan politik bagi masyarakat. Demokrasi dinilai mampu menjembati konsep perbedaan etnis yang ada dan menjalin hubungan sosial dalam masyarakat yang majemuk. Sedangkan Halabo (2015) menguraikan kondisi etnis yang mampu dipersatukan dalam kondisi perdamaian setelah konflik etnis berkepanjangan dengan perwujudan konsep negara federal. Etnis yang menjadi unsur penting dalam dinamika sosial di Ethiopia mengalami pergolakan yang memakan korban jiwa. Demokrasi terjadi dalam kerangka konflik, dalam artian masyarakat memiliki keleluasaan untuk mendapatkan hak setelah mengalami konflik

akibat perbedaan etnis antar mereka. Konflik yang diselesaikan dengan solusi perwujudan negara federal akhirnya mampu membuat Ethiopia lebih demokratis.

Kajian penulisan dari Furnivall, Wiradi dan Swasono dapat diungkapkan mengandung paradigma konstruktivisme (Denzin and Lincoln 2009), dimana mereka mencoba untuk menguraikan beragam persoalan etnisitas, demokrasi dan politik etnik yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia. Kajian yang beragam mulai dari masa pra kemerdekaan atau pada masa kolonialisasi Indonesia, masa kemerdekaan, masa pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi menguraikan bahwa transformasi kebangsaan dapat terjadi melalui sistem demokrasi yang diaplikasikan dengan mengedepankan keragaman etnis yang ada di Indonesia. Etnis menjadi potensi yang bisa dikembangkan untuk mendukung nilai-nilai demokrasi dan penerapan nilai demokrasi akan mampu mendukung terciptanya

jaminan akan pengakuan HAM bagi rakyat Indonesia dengan etnis yang beragam.

Perspektif Malasevic (2004) dalam sosiologi etnisitas terkait pandangan mengenai penerapan demokrasi di Indonesia maka dapat diuraikan bahwa kajian pendekatan Fungsional mampu meringkaskan persoalan perkembangan demokrasi di Indonesia. Persoalan silih ganti pemimpin negara tidak membuat persoalan jalannya demokrasi di negara multietnis seperti Indonesia mengalami hambatan. Demokrasi dapat berkembang dengan adanya penyesuaian antar komponen masyarakat dengan latar belakang etnis yang berbeda. Terkait dengan persoalan ekonomi dan politik pun hal yang sama terjadi, dalam artian bahwa sesungguhnya perbedaan yang ada lebih merupakan modal bangsa untuk berdinamika dan mencapai kondisi yang lebih baik lagi dan tidak dipandang hanya sebagai potensi konflik semata.

## **Refleksi tentang Demokrasi Ideal di Indonesia**

Perwujudan demokrasi di Indonesia diharapkan dapat memiliki ciri tersendiri yang sesuai dengan karakteristik Indonesia yang heterogen. Gambaran mengenai demokrasi yang mampu mengadopsi semua kepentingan rakyat Indonesia sebenarnya telah digambarkan dalam tulisan Latif (2011). Ia mengungkapkan bahwa Pancasila dengan sila-silanya dan makna yang terkandung dalam sila-sial tersebut sesuai dengan gagasan *founding fathers* Indonesia merupakan suatu konsep yang tepat dalam membingkai keanekaragaman yang dimiliki Indonesia dalam wadah persatuan. Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara mampu mengakui semua bentuk perbedaan yang ada dan mampu menjadi pemersatu bagi keberagaman tersebut. Gagasan demokrasi seutuhnya yang tidak menempatkan satu etnis berada dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan etnis lainnya akan mampu menciptakan keadilan sosial yang merata bagi

rakyat Indonesia. Kombinasi gagasan Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Tan Malaka tentang konsep demokrasi yang dirumuskan dalam Pancasila dan menjadi dasar pergerakan penyelenggaraan negara merupakan konsep yang ideal jika dalam penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mengalami penyimpangan dan diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, seperti misalnya melakukan tindakan diskriminasi terhadap etnis tertentu di Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

## **Penutup**

Gagasan awal perwujudan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kondisi masyarakat majemuk telah diungkapkan oleh *founding father* bangsa Indonesia. Kesadaran bahwa bangsa ini memiliki potensi yang berasal dari kemajemukan rakyatnya jika mampu dikembangkan dengan baik dan berkeadilan sosial maka akan mampu mendukung perkembangan Indonesia

mengarah pada kemajuan, namun jika tidak mampu dikelola dengan baik dan bangsa ini masih terus menerus berkuat dalam persoalan etnosentrisme, primordialisme dan sempitnya pandangan tentang keberagaman maka upaya perwujudan hal tersebut akan mengalami hambatan. Indonesia bisa terpecah seperti Yugoslavia dan tidak lagi menjadi negara kesatuan. Pedoman ”*Bhineka Tunggal Ika*” yang menjadi peneguhan atas perbedaan bangsa perlu ditanamkan secara mendalam pada rakyat Indonesia, sehingga mereka akan menyadari dan mampu bertoleransi terhadap perbedaan yang ada di negara ini.

## Referensi

- Denzin, Norman K and Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Furnivall, J.S. 2009. *Hindia Belanda : Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta (ID) : Freedom Institute
- Halabo, TT. 2015. *Ethnic Federal System : Origin, Ideology and Paradoxs*. *International Journal of Political Science and Development*, Vol. 4 (1), pp 1-15
- Hefner, R.W. 2011. *Politik Multikulturalisme*. Yogyakarta (ID) : Impulse-Kanisius.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna : Historis, Rasionalitas, dan aktualitas*. Jakarta (ID) : PT. Gramedia.
- Malasevic, S. 2004. *The Sociology of Ethnicity*. London (UK) : SAGE Publication Ltd
- Sjaf, Sofyan. 2014. *Politik Etnik : Dinamika Politik Lokal di Kendari*. Jakarta (ID) : Yayasan Obor Indonesia.
- Swasono, Sri-Edi. 2010. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan : Dari Klasik dan Neoklasikal sampai ke The Endo Laissez Faire*. Jakarta (ID) : Perkumpulan Prakarsa.
- Tridakusumah, Ac. *et.al.* 2015. *Social Identity, Ethnicity and Internal Mobility in Indonesia*. Paper.
- Wiradi, G. 2015. *Menilik Demokrasi*. Yogyakarta (ID) : Penerbit Tanah Air Beta. gan. *Perbandingan Konsep Demokrasi Dan Arah Demokrasi Ideal Indonesia Berbasis Keragaman Etnik*